

Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi

***Achmad Zaki; Syurya Hidayat; Syaparuddin**

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Jambi

**E- mail korespodensi: zakibae78@gmail.com*

Abstract

The objectives of this study were 1) To analyze BMD management by the Jambi Provincial Government in accordance with Permendagri No. 19 of 2016. 2) To analyze the potential for saving APBD in the Jambi Provincial Government in the management of BMD. 3) To identify and analyze the factors that influence the level of savings in BMD management in the Jambi Provincial Government. 4) To know and analyze the relationship between APBD savings from the elimination of BMD and regional revenues of Jambi Province, and 5) To analyze the strategies that the government should take in an effort to eliminate BMD for saving BMD maintenance costs in the Jambi Provincial Government. The analytical tool used is multiple linear regression, correlation, and SWOT analysis. Based on the results of the research that the implementation has been carried out in accordance with Permendagri No. 19 of 2016 is planning needs and budgeting, procurement, acceptance, storage, and distribution, utilization, security, assessment, transfer, and compensation claims. Partially the leadership, attitude, and policy variables have a significant effect on the savings variable. The result of the correlation shows that the saving value has a moderate relationship with the regional income of Jambi Province. Based on the results of the SWOT matrix analysis in eliminating BMD, namely recruiting HR, maintaining the completeness of BMD ownership documents, and providing additional incentives for BMD management staff.

Keywords: *Savings, Education, Leadership, Attitudes, Policies*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengelolaan BMD oleh Pemerintah Provinsi Jambi sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. 2) Untuk menganalisis potensipenghematan APBD pada Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan BMD. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghematan dalam pengelolaan BMD pada Pemerintah Provinsi Jambi. 4) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan penghematan APBD dari penghapusan BMD dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi, dan 5) Untuk menganalisis strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya penghapusan BMD untuk penghematan biaya pemeliharaan BMD pada Pemerintah Provinsi Jambi. Alat Analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda, korelasi dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Pemanfaatan, Pengamanan, Penilaian, Pemindahtanganan dan Tuntutan Ganti Rugi. Secara parsial variabel kepemimpinan, sikap dan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghematan. Hasil korelasi mengatakan nilai penghematan mempunyai hubungan yang sedang dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT dalam penghapusan BMD yaitu merekrut SDM, menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan BMD dan Memberikan Insentif tambahan bagi staf pengurus BMD.

Kata kunci: Penghematan, Pendidikan, Kepemimpinan, Sikap, Kebijakan

PENDAHULUAN

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu masyarakat memiliki bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya saat ini masih banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kurang melibatkan peran aktif masyarakat di daerah itu sendiri. Semua itu dapat terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak terawat, dikarenakan pembangunan tersebut tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, contoh nyata yang sering terlihat yaitu pembangunan wc umum yang nyatanya hanya menjadi monumen karena tidak adanya tindakan pemeliharaan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Asset atau aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai (Yusuf, 2010) Nilai ekonomi (*economic value*); 2) Nilai komersial (*commercial value*) dan 3) Nilai tukar (*exchange value*); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Kemudian, aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu real estate dan real property dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Real estate bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangible*), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Permendagri no. 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib akan menghasilkan kesempurnaan dalam penyajian neraca daerah. Diharapkan dengan diterbitkannya Permendagri no. 19 Tahun 2016 dapat membantu pemerintah dalam menyusun dan terutama menerapkan siklus penatausahaan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah sehingga dapat menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran yang benar.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan aset yang bergerak maupun tidak bergerak telah berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 namun masih ada beberapa siklus yang belum berjalan dengan baik. Berbagai permasalahan terhadap aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (*inventarisasi*) yang memadai; saldo aset tetap tidak

dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Aset tetap pada peralatan dan mesin yang berstatus rusak parah dan tidak bisa di gunakan atau dimanfaatkan lagi masih tercatat dalam daftar buku inventaris barang di Pemerintah Provinsi Jambi.Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Penghapusan dapat menjadi salah satu solusi untuk efisiensi anggaran, dalam hal dilakukan terhadap barang yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor dan hanya membebani biaya pemeliharaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kondisi dimana penghapusan dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain: pengajuan penghapusan terhadap barang milik daerah yang masih layak pakai, barang milik daerah yang telah berpindah tangan, dicuri, terbakar, namun belum diajukan penghapusan, dan lain-lain. Pada akhirnya penghapusan BMD ini dapat dijadikan sebagai solusi penghematan anggaran. Penghematan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, kepemimpinan, sikap dan kebijakan.

Pendidikan memiliki tujuan menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan mempunyai hubungan dengan penghematan, alasannya karena jika seseorang berpendidikan maka seseorang tersebut dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghemat suatu biaya yang harus dikeluarkan dengan cara meminimalisir biaya tersebut (Tirtarahardja, 2005).

Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kartono, 2010). Kepemimpinan diduga dapat mempengaruhi penghematan dikarenakan kepemimpinan memiliki analisis, perencanaan, penyelidikan, percobaan, supervisi dan pengembangan secara sistematis sehingga apabila dikaitkan dengan penghapusan BMD maka kepemimpinan dapat mempengaruhi penghematan biaya pemeliharaan.

Sikap adalah perilaku atau tingkah laku seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut (Djaali, 2008). Sikap sering dikaitkan dengan kesiapan mental individu yang mempengaruhi dan juga menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam merespon obyek atau situasi yang mempunyai arti baginya. Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek dan sikap terhadap objek yang disertai dengan perasaan positif maupun negatif. Sikap diduga memiliki dampak terhadap penghematan biaya pemeliharaan BMD, hal ni dikarenakan dalam menghapus BMD, pengurus harus memiliki sikap yang baik agar pelaksanaan penghapusan BMD dapat dilakukan dengan baik.

Pengertian kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2004) menjelaskan bahwa kebijakan dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya sehingga kebijakan diduga dapat mempengaruhi penghematan biaya pemeliharaan.

Penghematan biaya pemeliharaan BMD diduga mempunyai hubungan yang kuat dengan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan apabila biaya pemeliharaan BMD yang

menjadi beban pemerintah setiap tahunnya dapat dikurangi sehingga biaya pemeliharaan BMD yang sudah dihapuskan dan hasil lelang dapat dialihkan ke pendapatan lain-lain yang sah. Hal inilah yang menjadi tugas pemerintah agar dapat meningkatkan nilai penghematan dengan melakukan strategi peningkatan melalui analisis SWOT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjelaskan tentang pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang telah berpedoman dengan Permendagri No 19 tahun 2016 namun masih ada siklus yang belum berjalan dengan baik. Maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti aset-aset di Pemerintah Provinsi Jambi yang berjudul “**Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi**”.

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Selain itu penelitian menggunakan data yang telah tersedia dari badan atau instansi. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

Teknik analisis data analisis pertama

Alat analisis permasalahan pertama menggunakan prosedur analisis data yang digunakan adalah model analisa data kualitatif secara interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bersamaan.

Instrumen pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dan lembar observasi (pengamatan) dalam bentuk *checklist* (√). Untuk kuesioner ini di jawab oleh kepala bidang pengelolaan BMD di Biro Pengelolaan BMD sekretariat daerah Provinsi Jambi. Instrumen yang digunakan untuk observasi berupa lembar observasi dalam bentuk *check list* (√) yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Model matriks pengelolaan BMD

No	Permendagri No.19 Tahun 2016	Pelaksanaan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran			
2	Pengadaan			
3	Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran			
4	Pemeliharaan			
5	Penatausahaan			
6	Penggunaan			
7	Pemanfaatan			
8	Pengamanan			
9	Penilaian			
10	Penghapusan			
11	Pemindahtanganan			
12	Pembiayaan			
13	<u>Tuntutan Ganti Rugi</u>			

Sumber: Data penelitian, 2020(diolah)

Analisis kedua

Untuk menjawab masalah kedua yaitu menggunakan rumus penghematan anggaran APBD. Penghematan anggaran merupakan anggaran biaya pemeliharaan dari BMD yang

dihapus terhadap total anggaran biaya pemeliharaan BMD dalam APBD. Adapun yang rumus yang digunakan untuk menghitung penghematan anggaran APBD adalah sebagai berikut :

$$Penghematan APBD = \frac{\text{Anggaran Biaya Pemeliharaan BMD Yang Terhapus}}{\text{Total Anggaran Biaya Pemeliharaan APBD}} \times 100\%$$

Analisis ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga dalam penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghematan dalam pengelolaan BMD pada Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Setelah itu, persamaan regresi dibentuk dalam model regresi yang dapat dilihat sebagai berikut :

$$P = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 KP + \beta_3 SK + \beta_4 KB + e$$

Dimana:

P	= Penghematan
PD	= Pendidikan
KP	= Kepemimpinan
SK	= Sikap
KB	= Kebijakan
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
e	= Variabel Pengganggu

Analisis keempat

Untuk menjawab analisis keempat menggunakan rumus korelasi pearson. Rumus Koefisien Korelasi Pearson sebagai berikut (Sugiyono, 2012):

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

x	= Variabel bebas (nilai penghematan)
y	= Variabel terikat (Pendapatan daerah)
n	= Jumlah data

Nilai koefisien korelasi ini akan terletak diantara -1 dan 1 artinya: 1). Jika $r = 0$, hubungan antara kedua variabel lemah sekali / tidak terdapat hubungan sama sekali. 2). Jika $r = 1$, hubungan antara kedua variabel dikatakan sangat kuat dan positif. 3). Jika $r = -1$ atau mendekati -1, hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan negatif

Analisis kelima

Teknik analisis data permasalahan kelima yaitu menggunakan analisis SWOT. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama 30 tahun terakhir (Rangkuti, 2013). Senada dengan itu, Hamel

dan Prahaland (1995) juga mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan (Rangkuti, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan BMD oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah

Barang Milik Daerah (BMD) bukanlah barang untuk kepentingan pribadi melainkan barang publik karena sebagian besar sumber perolehannya berasal dari keuangan daerah dan dipergunakan sebagai sarana dan prasarana operasional para aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena hal tersebut, dalam mengelola BMD yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai dengan penghapusan BMD harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Tidak dapat dipungkiri, seiring berjalannya waktu, BMD yang dipergunakan secara terus menerus akan mengalami penurunan secara fisik maupun fungsi. Ada kalanya hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan pemeliharaan yang teratur. Namun, jika kegiatan pemeliharaan dinilai sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan karena pertimbangan biaya maupun manfaat yang tidak sesuai, maka BMD tersebut akan dihentikan penggunaannya dan dikondisikan rusak berat. Sebuah BMD yang telah dikondisikan rusak berat, penanganannya tidak serta merta hanya ditempatkan pada ruangan khusus/gudang melainkan harus segera dilakukan tindakan secara tepat yang berujung pada proses penghapusan BMD. Jika tidak demikian maka penumpukan BMD rusak berat tidak dapat dihindari yang memungkinkan untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan BMD yang telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai permendagri No. 19 tahun 2016 di pemerintah Provinsi Jambi

No	Permendagri No.19 Tahun 2016	Pelaksanaan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	✓	
2	Pengadaan	✓	
3	Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran	✓	
4	Pemeliharaan		✓
5	Penatausahaan		✓
6	Penggunaan		✓
7	Pemanfaatan	✓	
8	Pengamanan	✓	
9	Penilaian	✓	
10	Penghapusan		✓
11	Pemindahtanganan	✓	
12	Pembiayaan		✓
13	Tuntutan Ganti Rugi	✓	

Sumber : Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi, 2020

Pengelolaan BMD oleh Pemerintah Provinsi Jambi sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016 tercermin dari hasil pernyataan Biro Aset yang

diwawancarai tentang kesesuaian BMD sebesar 61 % dan 39 % menyatakan tidak sesuai yaitu dalam pemeliharaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pembiayaan.

Penghematan APBD pada pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan BMD

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu menggunakan rumus penghematan anggaran APBD. Penghematan anggaran merupakan anggaran biaya pemeliharaan dari BMD yang dihapus terhadap total anggaran biaya pemeliharaan BMD dalam APBD.

Tabel 3. Potensi penghematan APBD pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan BMD

Tahun	Anggaran Biaya Pemeliharaan BMD yang Terhapus (Rupiah)	Total Anggaran Biaya Pemeliharaan APBD (Rupiah)	Penghematan (%)
2014	223.255.321	11.812.450.850	1,89
2015	13.136.717	14.596.352.330	0,09
2016	33.753.349	15.342.431.265	0,22
2017	21.544.883	17.954.069.000	0,12
2018	83.779.732	19.483.658.573	0,43
Rata-Rata			0,55

Sumber : Biro Aset Provinsi Jambi, 2020 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa penghematan anggaran biaya pemeliharaan BMD rata-rata selama tahun 2014-2018 hanya sebesar 0,55 persen. Hasil ini diperoleh dari anggaran biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan BMD yang sudah dihapuskan terhadap total anggaran biaya pemeliharaan APBD. Penghematan anggaran biaya pemeliharaan BMD terbesar yaitu pada tahun 2014 dengan nilai penghematan sebesar 1,89 persen. Besarnya nilai penghematan anggaran biaya pemeliharaan BMD pada tahun tersebut dikarenakan ada 12 OPD yang melakukan penghapusan BMD dengan nilai penghapusan Rp. 11.812.450.850 dengan anggaran biaya pemeliharaan yang dapat dihapus dari APBD sebesar Rp. 223.225.321. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 merupakan tahun dengan nilai penghematan anggaran biaya pemeliharaan BMD terkecil yaitu hanya 0,09 persen dari total biaya pemeliharaan BMD dari APBD Provinsi Jambi. Kecilnya nilai penghematan tersebut dikarenakan hanya 1 OPD yang melakukan penghapusan BMD yaitu dari OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan nilai penghapusan sebesar Rp. 1.023.108.948 dengan anggaran biaya pemeliharaan yang dapat dihapus dari APBD sebesar Rp. Rp. 13.589.687.

Kesimpulannya, walaupun persentase penghematan terhadap APBD sangat kecil, namun seluruh OPD di Provinsi Jambi harus bisa meningkatkan nilai penghematan terhadap APBD setiap kali adanya kegiatan penghapusan aset BMD, walaupun kecil akan tetapi hasil penghematan sangat meringankan beban pemerintah Provinsi Jambi dan penghematan anggaran tersebut dialihkan alokasinya ke pengeluaran yang lebih bersifat *urgent* atau dapat digunakan untuk pembelian BMD yang baru untuk mengganti BMD yang terhapus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghematan dalam pengelolaan BMD di Provinsi Jambi

Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS. 20, maka hasil regresi adalah :

$$P = 1,023 + 0,064PD + 0,362KP + 0,720SK - 0,272KB + e$$

Tabel 4 Hasil regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistic		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerane	VIF
1 (Constant)	1,023	,161		6,368	,000		
PD	,064	,134	,067	,482	,631	,079	12,657
KP	,362	,143	,393	2,543	,014	,064	15,579
SK	,720	,151	,773	4,772	,000	,058	17,159
KB	-,272	,133	-,284	-2,038	,046	,079	12,652

a. Dependent Variable: P

Sumber: Data diolah, 2020

Uji hipotesis uji simultan

Uji F digunakan untuk untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Untuk menguji pengaruh antara variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (*variabel dependent*) secara simultan digunakan alat uji F statistik yang dapat dilihat pada hasil output program SPSS 20 pada tabel Anova sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil uji F statistik

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	41,686	4	10,422	149,539	,000 ^b
Residual	3,833	55	,070		
Total	45,519	59			

a. Dependent Variable: P

b. Predictors: (Constant), KB, KP, PD, SK

Sumber: Data diolah, (2020)

Berdasarkan hasil regresi diketahui atau diperoleh signifikansi F-sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas (pendidikan. Kepemimpinan, sikap dan kebijakan) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (penghematan).

Uji determinasi

Analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat beberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6 Hasil uji R² square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,957 ^a	,916	,910	,2639904

Sumber : Data diolah, (2020)

Tabel 6 dilihat *model summary* diketahui nilai R Square sebesar 0,916. Artinya sebesar 91,6 persen variasi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya 8,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji parsial

Uji statistik merupakan pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui

apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel lainnya konstan. Untuk melihat hasil setiap variabel terikat secara parsial yang diuji dengan uji-t secara rinci koefisien regresi pada setiap variabel dapat dilihat pada tabel 5.3 yang menunjukkan hasil sebagai berikut :

Variabel pendidikan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel pendidikan sebesar 0,631. dengan tingkat keyakinan ($\alpha =5\%$), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih besar dari alpha ($0,631 > 0,05$), artinya H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghematan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penghematan tidak benar dan tidak terbukti.

Variabel kepemimpinan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,014. dengan tingkat keyakinan ($\alpha =5\%$), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha ($0,014 < 0,05$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap penghematan. Dengan demikian hipotesis menyatakan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap penghematan benar dan terbukti.

Variabel sikap

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel sikap sebesar 0,000. dengan tingkat keyakinan ($\alpha =5\%$), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima artinya sikap berpengaruh signifikan terhadap penghematan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan sikap berpengaruh signifikan terhadap penghematan benar dan terbukti.

Variabel kebijakan

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel kebijakan sebesar 0,046. dengan tingkat keyakinan ($\alpha =5\%$), dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilita lebih kecil dari alpha ($0,046 < 0,05$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kebijakan berpengaruh signifikan terhadap penghematan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap penghematan benar dan terbukti.

Analisis ekonomi

Pengaruh pendidikan terhadap penghematan

Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap penghematan dikarenakan rata-rata pendidikan staf pengurus BMD di masing-masing OPD memiliki pendidikan yang tinggi dengan rata-rata pendidikan sarjana. Namun pendidikan yang tinggi namun tidak diiringi dengan wawasan pemeliharaan aset yang baik maka tidak berdampak terhadap penghematan.

Pengaruh kepemimpinan terhadap penghematan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap penghematan, dengan nilai koefisien sebesar 0,362 hal ini menunjukkan dengan asumsi variabel lain konstan, bila terjadi peningkatan kepemimpinan sebesar 1 maka penghematan mengalami peningkatan rata-rata adalah sebesar 0,362 persen. Berpengaruhnya kepemimpinan terhadap penghematan dikarenakan kepala OPD terus mengupdate kondisi BMD melalui staf kepengurusan BMD, karena apabila nilai manfaat

BMD sudah habis nilai manfaatnya maka kepala OPD meminta staf untuk menghapuskannya BMD tersebut dari daftar aset agar biaya pemeliharaan BMD tersebut akan tidak muncul lagi dalam pengajuan anggaran berikutnya.

Pengaruh sikap terhadap penghematan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap penghematan, dengan nilai koefisien 0,720 hal ini menunjukkan dengan asumsi variabel lain konstan, bila terjadi peningkatan sikap sebesar 1 maka penghematan mengalami peningkatan rata-rata adalah sebesar 0,720 persen. Berpengaruhnya sikap terhadap penghematan dikarenakan pengurus OPD diwajibkan untuk menghemat penggunaan aset yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini merupakan wujud sikap yang harus diterapkan oleh setiap pengurus OPD agar dapat meminimalisir penggunaan biaya pemeliharaan dan anggaran untuk mengganti barang tersebut dengan yang baru. Pengaruh kebijakan terhadap penghematan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa kebijakan berpengaruh signifikan terhadap penghematan, dengan nilai koefisien sebesar -0,272 hal ini menunjukkan dengan asumsi variabel lain konstan, bila terjadi peningkatan kebijakan sebesar 1 maka penghematan mengalami penurunan rata-rata adalah sebesar 0,272. Berpengaruhnya kebijakan terhadap penghematan disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan untuk pengamanan terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik, maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, penyerobotan dan pengambilalihan atau klaim pihak lain masih sudah optimal dan berdampak terhadap penghematan anggaran biaya pemeliharaan BMD.

Hubungan penghematan APBD dari penghapusan BMD dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi

Upaya penghapusan BMD yang dilakukan adalah untuk menghemat anggaran biaya pemeliharaan BMD yang dikeluarkan dari dana APBD Provinsi Jambi. Biaya pemeliharaan yang dihapus diduga mempunyai hubungan yang kuat terhadap pendapatan daerah Provinsi Jambi. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan anggaran biaya pemeliharaan BMD yang telah dihapus dengan pendapatan daerah dapat diuji dengan alat analisis Korelasi Pearson dengan aplikasi SPSS versi 20 dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7 Hasil uji korelasi pearson

		Correlations	
Pendapatan Daerah		Nilai Penghematan	
pearson correlation		1	,413
pendapatan daerah	sig. (2-tailed)		,489
	n	5	5
	pearson correlation	,413	1
nilai penghematan	sig. (2-tailed)	,489	
	n	5	5

Sumber: Data diolah, (2020)

Berdasarkan hasil korelasi pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai penghematan mempunyai nilai korelasi sebesar 0,413 dan mempunyai hubungan yang sedang dengan pendapatan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai penghematan mempunyai hubungan yang sedang dikarenakan nilai penghematan anggaran biaya pemeliharaan dari BMD yang dihapus nilainya masih sangat kecil, sehingga hubungan antara kedua variabel tidak kuat. Seharusnya pemerintah dapat meningkatkan penghematan pada BMD yang tidak lagi memiliki nilai manfaat melalui audit masing-masing OPD terhadap BMD sehingga hal tersebut dapat menghemat biaya pemeliharaan BMD dan hasil lelang barang

tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut juga harus dibantu oleh kesadaran setiap pemilik BMD untuk melaporkan BMD yang menjadi tanggung jawabnya tidak lagi memiliki nilai manfaat.

Biaya pemeliharaan BMD pada pemerintahan Provinsi Jambi

Dari hasil wawancara ditetapkan sepuluh faktor internal dan delapan faktor eksternal yang mempengaruhi upaya penghapusan BMD untuk penghematan biaya pemeliharaan BMD. Faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan penghematan upaya penghapusan BMD untuk penghematan biaya pemeliharaan BMD di Pemerintah Provinsi Jambi dan ditampilkan dalam Tabel 5.7, 5.8, 5.9 dan 5.10. Bobot diperoleh melalui wawancara diolah dengan metode *paired comparison*. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT penghapusan BMD sebagai upaya penghematan biaya pemeliharaan BMD oleh Biro Pengelolaan BMD SETDA Provinsi Jambi, diperoleh delapan alternatif strategi yang dihasilkan untuk meminimalkan masalah dalam kegiatan penghapusan BMD.

Strategi S-O atau strategi kekuatan-peluang merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi dan kemampuan untuk meraih peluang dapat dirumuskan strategi yaitu melakukan evaluasi rutin oleh BPK terhadap dokumen penghapusan BMD atas dasar Permendagri No. 19 tahun 2016. Kemudian memanfaatkan kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menyetujui penghapusan BMD.

Strategi S-T atau strategi kekuatan-ancaman adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi ancaman eksternal yang dihadapi oleh pengelola BMD. Adapun strategi kekuatan-ancaman Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi yaitu merekrut SDM untuk menutupi kekurangan SDM penilai pemerintah (KPKNL) sehingga dapat mempermudah Pemerintah dalam menilai aset. Kemudian mempercepat hasil sensus BMD dengan mengupayakan staff OPD.

Strategi W-O atau strategi kelemahan-peluang merupakan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Alternatif strategi yang didapat yaitu menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan BMD secara intensif dan Memberikan Insentif tambahan bagi staf pengurus BMD agar menjadi motivasi bagi sehingga dalam pengurusan penghapusan BMD dapat dilakukan secara maksimal.

Strategi W-T atau strategi kelemahan-ancaman adalah strategi yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Alternatif strategi yang didapat yaitu penggantian pengurusan BMD harus dilakukan secara intensif agar tidak ada kekeliruan dalam penyimpanan dokumen kepemilikan BMD dan sensus BMD harus dilaksanakan secara cepat agar BMD yang dihapus tidak kehilangan nilai ekonomisnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 13 proses pengelolaan BMD oleh setiap OPD yang telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Pemanfaatan, Pengamanan, Penilaian, Pemindahtanganan dan Tuntutan Ganti Rugi. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pemeliharaan, Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penghematan anggaran biaya pemeliharaan BMD rata-rata selama tahun 2014-2018 hanya sebesar 0,55 persen. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, secara overall semua variabel berpengaruh signifikan terhadap penghematan, sedangkan secara parsial variabel kepemimpinan,

sikap dan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghematan. Adapun variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penghematan. Berdasarkan hasil korelasi bahwa nilai penghematan mempunyai hubungan “Sedang” dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT penghapusan BMD sebagai upaya untuk meminimalkan masalah dalam penghematan biaya pemeliharaan BMD oleh Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi, yaitu merekrut SDM untuk menutupi kekurangan SDM penilai pemerintah (KPKNL) sehingga dapat mempermudah Pemerintah dalam menilai aset. Selanjutnya menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan BMD secara intensif dan Memberikan Insentif tambahan bagi staf pengurus BMD agar menjadi motivasi bagi sehingga dalam pengurusan penghapusan BMD dapat dilakukan secara maksimal dan penggantian kepengurusan BMD harus dilakukan secara intensif agar tidak ada kekeliruan dalam penyimpanan dokumen kepemilikan BMD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran untuk penelitian ini yaitu perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana pengelola aset tetap/Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset tetap. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian, bersikap tegas dan memberikan kebijakan yang ketat terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak melakukan penggantian tiap tahunnya. Perlunya perhatian penuh dalam melakukan penilaian aset dengan berpedoman pada SAP serta melibatkan tim penilai yang bersertifikat dibidangnya dan independent. Untuk mengatasi kendala internal yang terjadi seperti ketidaklengkapan dokumen kepemilikan yaitu dengan menjaga kelengkapan dokumen kepemilikan BMD secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Devita, A Delis, J Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2 (2), 63-70
- Djaali. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara : Jakarta
- Donovan, F. dan A.C. Jackson. (1991). *Managing Human service organizations*. Prentice Hall : New York
- Hamel dan Prahalad. (2015). *Management*. Tata McGraw Hill : New Delhi
- Kartono Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP: Jakarta
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung
- Tirtarahardja Umar. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta : Jakarta
- Sunargo, S, dan Hastuti. D. (2020). Mengatasi Perilaku Kerja Kontraproduktif Melalui Peran Integratif Politik Organisasional dan Kecerdasan Emosional Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 45-54
- Yusuf, Muhammad. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat: Jakarta